



# UNIVERSITAS WIRARAJA

## LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088  
e-mail : lppm@wiraraja.ac.id Website : lppm.wiraraja.ac.id

### SURAT PERNYATAAN

Nomor : 016/SP.HCP/LPPM/UNIJA/I/2024

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Anik Anekawati, M.Si  
Jabatan : Kepala LPPM  
Instansi : Universitas Wiraraja

Menyatakan bahwa :

1. Nama : Tita Tanjung Sari, M.Pd  
Jabatan : Staf Pengajar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Telah melakukan cek plagiasi ke LPPM menggunakan *software turnitin.com* untuk artikel dengan judul "**TRIPLE HELIX KEBIJAKAN PENDIDIKAN, TATA KELOLA UNIT PENDIDIKAN, DAN SUMBER DAYA MANUSIA**" dan mendapatkan hasil similarity sebesar 11%.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Sumenep, 16 Januari 2024  
Kepala LPPM  
  
Dr. Anik Anekawati, M.Si  
NIDN. 0714077402



# Triple Helix Kebijakan Pendidikan, Tata Kelola Unit Pendidikan, dan Sumber Daya Manusia

*by* Tita Tanjung Sari, S.pd., M.pd.

---

**Submission date:** 16-Jan-2024 01:18PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2271753073

**File name:** Tita\_7.pdf (376.48K)

**Word count:** 3200

**Character count:** 20991

## Triple Helix Kebijakan Pendidikan, Tata Kelola Unit Pendidikan, dan Sumber Daya Manusia

Tita Tanjung Sari

Universitas Wiraraja, Indonesia; tita.tanjung.2221039@students.um.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

#### Keywords:

Triple Helix;  
Education Governance;  
Human Resources

#### Article History:

Received 2022-06-02  
Revised 2022-08-23  
Accepted 2022-11-23

### ABSTRAK

This study aims to find out how the Triple Helix collaborative relationship between education policies, governance in the education unit and its effect on improving the quality of our human resources. This research uses a qualitative approach with the type of library research. The results of the study show that the synergy of all stakeholders is very much needed in the development of Indonesian human resources. The government, education unit managers, graduate users, and the community must collaborate with each other in developing the nation's human resources, because the best investment of a nation is the skills of its human resources. The government designs a policy and expands education services that can reach the entire community and the education unit implements the policy so that the movement of the nation's progress towards a better direction. One way to increase investment in human resources is through education. Education must be carried out equitably and with social justice. Because every citizen has the right to the availability of education and without the marginality of certain groups. The triple helix and collaborative relationship between the state, education policy, schools and universities and stakeholders also greatly determines the output of education.

*Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-NC-SA.*



#### Corresponding Author:

Tita Tanjung Sari  
Universitas Wiraraja, Indonesia; tita.tanjung.2221039@students.um.ac.id

### 1. PENDAHULUAN

Negara manapun akan selalu menginginkan stabilitas ekonomi dan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Untuk itu dibutuhkan sebuah kebijakan pendidikan yang dapat menciptakan sumber daya manusia kompetitif sesuai dengan dunia global, responsif terhadap perubahan, dan sesuai dengan pasar tenaga kerja saat ini (Bell & Stevenson, 2006, hal. 44). Pendidikan menjadi salah satu alternatif modal manusia agar peserta didik siap berkompetisi di dunia usaha dan dunia industri. Pendidikan pada hakikatnya penting untuk dilaksanakan oleh setiap warga negara (Marsari, Hairani, & Gistituati, 2021).

Pendidikan memegang rencana strategis untuk menciptakan sumber daya manusia unggul melalui perancangan kurikulum dan sistem evaluasi terpadu sesuai dengan kebijakan pemerintah yang diterapkan. Lebih dari ini negara juga harus mampu menjamin <sup>5</sup>merataan Pendidikan sesuai dengan Amanah Undang-undang. Hal ini juga dijelaskan kembali pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk menerima pengajaran (MKN, 1945). Makalah ini akan membahas lebih dekat, apa dan bagaimana *Triple Helix* atau hubungan kolaboratif sinergitas antara kebijakan pendidikan, modal manusia, kemasyarakatan, dan keadilan sosial.

## 2. <sup>1</sup>METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teoriteori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Menurut (Zed, 2014) ada empat tahap studi pustaka yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca serta mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Metode analisis menggunakan analisis konten dan analisis deskriptif. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis pembentukan kebijakan Pendidikan, serta ulititas secara ekonomi dan modal sosial

Pendidikan berperan penting dalam peningkatan mutu SDM (Anjelina, Silvia, & Gitituati, <sup>13</sup>2021). Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi jika kemampuan bangsa-bangsa untuk bersaing secara internasional menjadi salah satu indikator kemakmuran sebuah bangsa (Bell & Stevenson, 2006). Adanya arus globalisasi juga sangat berdampak pada pembentukan kebijakan pendidikan di banyak negara. Adalanya globalisasi ekonomi sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara makro dan lahirnya perusahaan multinasional di berbagai negara, hal ini berdampak langsung pada kebijakan sosial. Nilai dan tindakan pemerintah dengan tantangan globalisasi ini semakin mengarah pada <sup>12</sup>keharusan ekonomi dari pada prinsip dan prosedur pendidikan. Pada situasi seperti ini, kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia unggul sangat diperlukan. Meskipun penentuan konten kebijakan dan urutan tahapan proses kebijakan sendiri tidak bersifat statis (Yuliah, 2020). Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh adanya perbedaan perspektif dan teori yang digunakan dalam pengambilan sebuah kebijakan. Sampai saat ini, pemerintah menganggap bahwa manusia adalah aset potensial untuk menghadapi arus perkembangan globalisasi ini.

Gambaran umum modal manusia dapat diperhatikan dari pernyataan <sup>4</sup>*human capital, the set of skills, knowledge, capabilities and attributes embodied in people, is crucial to firms' capacity to absorb and organize knowledge and to innovate* (Lenihan, McGuirk, & Murphy, 2019). Modal manusia diartikan sebagai seperangkat keterampilan, pengetahuan, kemampuan, dan atribut yang terkandung dalam diri seseorang. Secara garis besar, modal diartikan sebagai sumber daya yang tersedia melalui jaringan yang dipasarkan secara individu, kelompok, perusahaan, dan komunitas. Di mana orang-orang diyakini bertindak secara rasional dan berfungsi secara setara. Jika modal fisik adalah produk dari perubahan bahan mentah, maka modal manusia menekankan pada skill yang terdiri atas keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan lain yang dapat meningkatkan produktivitas seseorang (Bell & Stevenson, 2006). Modal manusia juga diartikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan kekayaan, karena *skill* ini dapat menentukan seberapa besar kapasitas dan kontribusi mereka terhadap kinerja ekonomi di negaranya. Sebagai contoh *rekrutmen* pegawai baru atau peserta didik baru.

Wacana selanjutnya, modal manusia sangat erat hubungannya dengan kebijakan pendidikan. pergeseran paradikma baru dari konsep sistem ekonomi dan sosial modern sangat bergantung pada produksi massal dalam skala industri dengan standar tertentu (*fordist*), keterampilan tinggi dan dorongan pengetahuan menjadi investasi di modal manusia, hal ini juga akan menjadi daya saing nasional. Senada dengan Lloyd dan Payne, Schultz (Bell & Stevenson, 2006) juga mengemukakan bahwa penduduk adalah bagian penting dari kekayaan negara. Dalam konteks pasar, pendidikan diartikan sebagai penyedia sumber daya manusia yang terampil yang sesuai dengan keinginan pasar. Pendidikan diharapkan mampu mencetak generasi yang adaptif dan dapat mendukung perkembangan zaman. Diakui secara luas, bahwa pendidikan selalu mengarah pada permintaan pasar/stakeholder. Melalui pendidikan, manusia akan dibekali dengan berbagai keterampilan khusus sebagai tuntutan pasar tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Disisi yang lain, lembaga pendidikan juga harus adaptif dalam menanggapi tuntutan negara untuk terus dapat menghasilkan lulusan dengan keterampilan dan pengetahuan yang tersandar dan tujuan akhirnya adalah peningkatan ekonomi.

Salah satu kebijakan negara yang diluncurkan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia unggul adalah peluncuran kurikulum dan berbagai kegiatan MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) pada setiap lini Pendidikan. Merdeka belajar adalah bentuk kebijakan baru di Indonesia saat ini (Anjelina et al., 2021). Selain berbagai kebijakan pendidikan yang di luncurkan tersebut, lebih dari itu negara juga harus berfungsi sebagai control pusat atas penyedia layanan pendidikan. Mulai dari konten kurikulum yang di atur sedemikian rupa mulai dari konten dan sistem penilaian. Sekolah dan perguruan tinggi juga berkontribusi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebijakan nasional tersebut. Disinilah letak masalahnya, konsekuensi dari ketumpangtindihan kebijakan, karena pedagogi, konten isi kurikulum, dan bentuk penilaian harus sesuai dengan permintaan pasar. Pemerintah merumuskan kebijakan pendidikan sesuai dengan permintaan pasar, melihat dari fungsi ekonomi, tuntutan pasar tenaga kerja demi memaksimalkan pertumbuhan ekonomi. guru, siswa, dan orang tua adalah mitra dalam pendidikan. Orang tua juga harus berperan aktif dalam pemilihan pendidikan. Seorang individu berusaha memaksimalkan keuntungan pribadi dan negara berusaha memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, konsekuensi logis dari ini adalah pendidikan dianggap sebagai investasi produktif.

Hal ini menjadi menarik jika kita kaitkan dengan kosep *human capital* dan *human resources*. Human capital menganggap manusia sebagai modal yang harus selalu di bina dan naikkan kemampuannya (Boon, Eckardt, Lepak, & Boselie, 2018) agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Sementara *human resources* beranggapan bahwa manusi hanya sebagai sumber daya yang dapat di eksplorasi. Hal ini menjadi dua pandangan yang berbeda dalam manajemen sumber daya manusia kita. Namun (Ployhart, Nyberg, Reilly, & Maltarich, 2014) memperkenalkan konsep baru yang menggabungkan antara human capital dan human resources. Teorinya disebut *human capital resources*, konsep ini menggabungkan antara *human capital* dan *human resources*. Hal ini disebabkan karena aplikasi konsep human capital mengakibatkan iklim kompetisi berkurang dan mengurangi produktivitas. Dengan adanya aplikasi konsep baru ini, dirahapkan iklim kompetitif secara natural dapat terbentuk tanpa mengurangi rasa kemanusiaan .

#### **Legitimasi teori modal manusia membentuk kebijakan Pendidikan.**

Penerapan teori modal manusia dan pendidikan harus dilihat dalam konteks global. dampak globalisasi memaksa negara untuk menggunakan pendidikan sebagai penyedia sumber daya manusia yang mampu menanggapi kebutuhan ekonomi dan bisnis tertentu, meskipun tidak dapat diuniversalkan,

namun teori modal sosial tentu sangat umum digunakan sebagai alasan sosio politik. Dampak dari teori modal sosial ini telah diteliti di beberapa negara. Di Amerika Serikat misalnya, Elmore (1988) dalam (Bell & Stevenson, 2006) menyerukan reformasi mempertahankan standar hidup saat ini dan mendapatkan kembali posisi kompetitifnya dalam ekonomi dunia. Amerika Serikat berpendapat bahwa mereka membutuhkan pendidikan yang dapat memperbaiki dan merekonstruksi tatanan pendidikan dengan kinerja ekonomi. Demikian yang dilakukan di Australia, kemampuan matematika siswa harus ditingkatkan agar ekonomi berkembang secara kompetitif (Kemp, 2000) dalam (Bell & Stevenson, 2006) disini telah dikemukakan bahwa rasionalisme ekonomi berbasis modal manusia telah menyusup ke dalam pembuatan kebijakan pendidikan sedemikian rupa sehingga model dan formula ekonomi telah menggantikan nilai masyarakat yang adil, kreatif, dan manusiawi hal ini diungkapkan oleh Oglivie dan Crowther di tahun 1992 dalam (Bell & Stevenson, 2006).

Sistem Pendidikan tinggi di Selandia Baru harus berkontribusi pada pembangunan ekonomi dengan menyediakan lulusan untuk pekerjaan berbasis sains (Gould, 2001) di kutip dari (Bell & Stevenson, 2006) Sedana dengan Yunani, pengenalan berbagai program ilmiah baru dan teknologi baru, di maksudkan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi negara. Pendidikan dimaksudkan untuk pengembangan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan agar lulusan dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang tersedia diantara profesi teknis di pasar tenaga kerja secara mandiri. Di Inggris, pemerintah konservatif saat itu berpendapat bahwa kemakmuran sebagai suatu bangsa bergantung pada seberapa baik sekolah kita, dalam kemitraan dengan orang tua dan mempersiapkan kaum muda untuk bekerja. Investasi dalam modal manusia sangat penting untuk kesuksesan di masa depan ekonomi. Pembelajaran sepanjang hayat akan membangun modal manusia yang tangguh. Belajar adalah kunci kemakmuran, pendidikan akan menjadi fondasi keberhasilan dalam ekonomi global. Negara **membutuhkan tenaga kerja yang terdidik dan terlatih untuk** mengisi pembangunan bangsa.

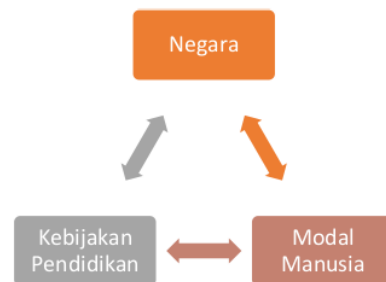
Sedangkan, di wilayah Asia, modal manusia pasti sangat menentukan kebijakan pendidikan. Di banyak wilayah di Asia, hubungan erat antara pendidikan dan pembangunan ekonomi diakui secara luas dan sejumlah inisiatif perbaikan telah diperkenalkan untuk memperkuat kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya di Singapura, pemerintah dengan sengaja mengadopsi kebijakan untuk menghindari ekonomi, biaya tenaga kerja yang rendah yang umum terjadi di wilayah Asia Tenggara pada umumnya, dengan mengembangkan kebijakan naggatan kerja yang terdidik dan terlatih. Pemerintah Singapura sangat memahami hubungan erat antara sistem pendidikan dan produktifitas, tugas negara adalah memastikan bahwa seiring berkembangnya industri, modal manusia ada di tempat untuk memanfaatkan modal fisik secara efektif.

Perubahan sistem pendidikan besar-besaran di Singapura terjadi setelah laporan dari Komite perencanaan ekonomi yang menuntut perluasan dan peningkatan pendidikan yang substansial untuk memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi Singapura dalam lingkungan yang sangat kompetitif. Perubahan itu berfokus pada tiga bidang, (1) mengidentifikasi keterampilan dasar yang diperlukan orang-orang secara efektif untuk berkontribusi pada masyarakat industri maju, (2) pengembangan keterampilan teknologi tingkat menengah, (3) perluasan pendidikan tinggi. Tujuan reformasi ini tentu saja untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk membangun Singapura sebagai negara yang maju secara ekonomi.

### Penerapan teori modal manusia untuk kebijakan Pendidikan

Fenomena permasalahan pendidikan Indonesia tiada habisnya mengingat sumber daya alam yang sangat baik. Populasi penduduk yang tinggi namun tidak seimbang dengan sumber daya manusia yang ada (Yanti, 2020). Modal manusia masih dianggap sebagai investasi, namun laporan dari OECD (OECD 1996a) berpendapat bahwa meskipun investasi pendidikan merupakan pembentuk modal, Namun nilainya sulit untuk di tetapkan. Monteils pada tahun 2004 melakukan survey di 10 negara selama 2 tahun, hasilnya dia tidak menemukan korelasi positif antara investasi pendidikan dan pertumbuhan ekonomi (Bell & Stevenson, 2006). Melihat hal tersebut timbul pertanyaan apakah Pendidikan mampu meningkatkan produktivitas seseorang? Mungkin saja pendidikan bertindak sebagai perangkat seleksi yang memungkinkan pengusaha untuk mengidentifikasi pekerja yang potensial dengan keterampilan tertentu dan membuat mereka lebih produktif.

Melihat uraian di atas, hubungan *triple helix* pemerintah (negara), kebijakan pendidikan, dan modal manusia dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Triple Helix Kebijakan Pendidikan, dan Modal Manusia

Sebuah Negara tentu memiliki keinginan kuat untuk mengembangkan negara agar dapat berkompetisi secara global. Hal ini bertujuan untuk peningkatan ekonomi secara makro sehingga bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah harus di dukung oleh sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing secara global, kompetitif di pasar tenaga kerja, dan responsif terhadap perubahan dunia. Untuk mencapai sumber daya manusia unggul sesuai keinginan pasar global, sehingga negara membuat berbagai kebijakan dan investasi untuk mendukung peningkatan kapabilitas human capital yang dimiliki. Kebijakan-kebijakan dan *support* anggaran belanja negara pada sektor Pendidikan menjadi hal yang wajib di lakukan demi terwujudnya *human capital* yang berdaya saing.

Guna menjadikan sumber daya manusia unggul yang berdaya saing, pemerintah dan kebijakan pendidikannya mengarah kepada sekolah dan perguruan tinggi untuk mendesain pendidikan sesuai dengan keinginan stakeholder. Tentu saja pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa. Melalui desain pendidikan yang baik, sistem evaluasi autentik, kesempatan untuk magang di dunia usaha dan industri, diharapkan peserta didik siap bersaing di dunia global. Bagaimanapun investasi terbaik adalah investasi pada sumber daya manusia yang unggul, karena sumber daya manusia yang unggul akan sangat berpengaruh pada produktivitas tenaga kerja.

### Kebijakan Pendidikan di Masyarakat yang Berkeadilan Sosial

Pendidikan merupakan salah satu ujung tombak kemajuan bangsa pada masa depan bangsa (Alburaidi & Ambusaidi, 2019). Oleh sebab itu, pemerintah wajib menjamin keadilan pendidikan bagi seluruh warga negaranya. Hal ini juga tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinie ke 2. Yang berbunyi sebagai berikut. “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,.....”.

Hal ini menandakan, bahwa pendidikan dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi hal yang sangat krusial dalam pembangunan negara. Untuk mendapatkan sumber daya manusi unggul atau *human capital* yang baik tidak mudah, diperlukan pemerataan pendidikan, kesempatan untuk praktik bekerja, dan tentu saja harus di dukung dengan tubuh manusia Indonesia yang sehat.



**Gambar 2.** Investasi Negara Agar Terbentuk Human Capital yang Baik

Kebijakan pendidikan selah lebih dari sekedar kebijakan ekonomi. Pendidikan masih menjadi investasi terbaik suatu negara. Salah satu kebijakan nasional di bidang pendidikan yang mendukung peningkatan akses dan peningkatan mutu pendidikan adalah kebijakan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan (Rochaendi, 2018). Pendidikan dan kesempatan pelatihan kerja juga sangat luas jangkauannya, hasil penelitian (Sima, 2020) mengungkapkan beberapa aspek kunci untuk pengembangan modal manusia: informasi, pekerjaan baru, Internet, teknologi, pelatihan, pendidikan, keterampilan baru, otomatisasi, komunikasi, inovasi, profesional, produktivitas, kecerdasan buatan, digitalisasi, *e-recruitment*, dan Internet

Negara yang memiliki human capital yang baik secara tidak langsung negara tersebut telah memiliki investasi terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebut saja Singapura, negara terkecil di Asia namun tingkat ekonomi masyarakatnya sedemian maju. Hal ini karena Singapura memiliki *human capital* sebagai investasi yang baik. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Banyak para pakar telah mencemaskan bahwa pendidikan nasional dewasa ini, telah merupakan subordinasi dari kekuatan-kekuatan politik praktis (Yanti, 2020). Menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negaranya. Dengan pemerataan pendidikan, artinya negara memberikan kesempatan bagi seluruh warga negaranya untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara, meskipun pemerataan sumber daya manusia pasti akan menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi kita semua, mengingat disparitas Pendidikan yang masih sangat tinggi.

#### 4. KESIMPULAN

Berbicara tentang pendidikan, sumber daya manusia, dan kebijakan pendidikan menjadi topik yang selalu menarik untuk di bahas. Karena unsur terbentuknya sebuah negara salah satunya karena



ada masyarakatnya. Masyarakat menjadi hal yang krusial untuk mendapatkan perhatian agar dapat menjadi modal investasi negara. Salah satu cara meningkatkan investasi *human capital* adalah dengan pendidikan. Pendidikan harus terselenggara secara merata dan berkeadilan sosial. Karena setiap warga negara berhak atas tersedianya pendidikan dan tanpa marginalitas dari golongan tertentu. Hubungan *triple helix* dan kolaboratif antara negara, kebijakan pendidikan, sekolah dan perguruan tinggi serta stakeholder juga sangat menentukan output pendidikan.

Memiliki kualitas sumber daya manusia (*human capital*) yang baik, tentu menjadi dambaan setiap negara. Untuk itu negara membuat sebuah regulasi tentang pendidikan yang mengharapkan sekolah dan perguruan tinggi mampu mendesain kegiatan belajar dan evaluasi pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan peserta didik agar dapat bersaing di dunia usaha, industri, dan bersaing secara global.

## REFERENSI

- Alburaidi, A., & Ambusaidi, A. (2019). The impact of using activities based on the Montessori approach in science in the academic achievement of fourth grade students. *International Journal of Instruction*, 12(2), 659–708. <https://doi.org/10.29333/iji.2019.12244a>
- Anjelina, W., Silvia, N., & Gitituati, N. (2021). Program Merdeka Belajar, Gebrakan Baru Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1977–1982.
- Bell, L., & Stevenson, H. (2006). *Education policy: process, themes and impact. Leadership for learning*. 209.
- Boon, C., Eckardt, R., Lepak, D. P., & Boselie, P. (2018). Integrating strategic human capital and strategic human resource management. *International Journal of Human Resource Management*, 29(1), 34–67. <https://doi.org/10.1080/09585192.2017.1380063>
- Lenihan, H., McQuirk, H., & Murphy, K. R. (2019). Driving innovation: Public policy and human capital. *Research Policy*, 48(9), 103791. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.04.015>
- Marsari, H., Hairani, S., & Gistituati, N. (2021). Model perumusan kebijakan pendidikan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 89. <https://doi.org/10.29210/3003908000>
- MKN. *Undang-Undang Dasar Negara RI 1945*. , 105 § (1945).
- Ployhart, R. E., Nyberg, A. J., Reilly, G., & Maltarich, M. A. (2014). Human Capital Is Dead; Long Live Human Capital Resources! *Journal of Management*, 40(2), 371–398. <https://doi.org/10.1177/0149206313512152>
- Rochaendi, E. D. A. S. (2018). *TRANSFORMASI: Jurnal Kepemimpinan Dan Pendidikan Islam Volume: 1 Nomor 2*. 29–44.
- Sima, V. et. al. (2020). Influences of the Industry 4.0 Revolution on the Human Capital Development and Consumer Behavior: A Systematic Review. *Sustainability (Switzerland)*, 1–28.
- Yanti, S. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 11–26. <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i1.1662>
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 129–153. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan (Cet-3)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.



# Triple Helix Kebijakan Pendidikan, Tata Kelola Unit Pendidikan, dan Sumber Daya Manusia

## ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://ummaspul.e-journal.id">ummaspul.e-journal.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://arti-definisi-pengertian.info">arti-definisi-pengertian.info</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://www.journal.iainlangsa.ac.id">www.journal.iainlangsa.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://ejournal.alkhairat.ac.id">ejournal.alkhairat.ac.id</a> Internet Source	<1%
7	<a href="http://mafiadoc.com">mafiadoc.com</a> Internet Source	<1%
8	<a href="http://akademik.unsoed.ac.id">akademik.unsoed.ac.id</a> Internet Source	<1%
9	<a href="http://pedomansdm.wordpress.com">pedomansdm.wordpress.com</a> Internet Source	<1%

10	<a href="http://abs524lavoila.blogspot.co.id">abs524lavoila.blogspot.co.id</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="http://bappedatamiang.go.id">bappedatamiang.go.id</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://beritatoltangerang.blogspot.com">beritatoltangerang.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://independenceday.xyz">independenceday.xyz</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://lp3m.unuja.ac.id">lp3m.unuja.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://najaciesagitariuskadiri.wordpress.com">najaciesagitariuskadiri.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://ojs.uph.edu">ojs.uph.edu</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://rumoehlensa.wordpress.com">rumoehlensa.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off